

IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM NOMOR 16.A TAHUN 2019 TENTANG PENANGGULANGAN STUNTING DI KOTA SUBULUSSALAM

Wita¹, Raden Deni Atmiral²

¹Alumni Prodi Ilmu Administrasi Negara FISIP UISU

²Dosen Prodi Ilmu Administrasi Negara FISIP UISU

eMail: witauisu@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 16.a tahun 2019 tentang penanggulangan stunting Kota Subulussalam yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Kota Subulussalam. Teori yang dipakai pada penelitian ini adalah teori George C. Edward III (1980). Penelitian ini deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengambilan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Penentuan informan penelitian menggunakan teknik purposive sampling. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Subulussalam informan utama adalah Bidang Kesehatan Keluarga Dan Gizi dan Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Subulussalam informan pendukung adalah Kader Kota Subulussalam dan Masyarakat Kota Subulussalam. Teknik analisa data yang digunakan dibagi menjadi beberapa, yaitu reduksi data, penyajian data dan terakhir penarikan kesimpulan. Penelitian ini menunjukkan implementasi Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 16.a tahun 2019 tentang penanggulangan stunting Kota Subulussalam yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Kota Subulussalam belum Optimal, hal ini dikarenakan oleh aspek komunikasi dalam menedukasi dan mensosialisasikan belum maksimal dan sumber-sumber dalam mengimplementasikan kebijakan sudah ada namun belum berjalan dengan baik.

Kata kunci: *Implementasi, Peraturan, Stunting, Kota Subulussalam.*

PENDAHULUAN

Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang sedang menghadapi masalah tingginya angka prevalensi stunting di provinsi Aceh. Berdasarkan data tahun 2018 dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), menunjukan Provinsi Aceh menduduki

peringkat ketiga tertinggi prevalensi stunting pada anak di bawah lima tahun (balita) di Indonesia, yaitu 37,9% artinya 1 dari 3 anak balita di Aceh mengalami stunting dibandingkan angka

rata-rata Nasional 30,8% serta. Angka stunting yang lebih tinggi terjadi pada anak usia bawah dua tahun (baduta), dimana Aceh berada pada peringkat pertama dengan prevalensi stunting tertinggi 37,9% dibandingkan dengan angka rata-rata nasional yaitu 29,9%2 sedangkan data terakhir yang terbit lima tahun sekali, maka hasil dari survei status gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 menyatakan Provinsi Aceh memiliki prevalensi balita stunting (tinggi badan menurut umur) sebesar 31,2%.

Kota Subulussalam adalah salah satu Kota/Kabupaten dengan angka

perevelensi yang cukup tinggi di Provinsi Aceh. Tercata pada tahun 2018 dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam Riset Kesehatan Dasar (Riskesdes) tingkat penderita (prevalensi) anak stunting di Kota Subulussalam adalah yang tertinggi dari Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Aceh yaitu sebesar 49,9% 4 untuk data terakhir terbit selama lima tahun sekali dari SSGI (Surve Status Gizi Indonesia) pada tahun 2022 prevelensi balita stunting di Kota Subulussalam sebesar 47,9%.5 Angka stunting yang tinggi menunjukkan adanya masalah kesehatan dan gizi masyarakat yang perlu ditangani secara serius. Stunting dapat berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan anak secara fisik dan kognitif, serta meningkatkan risiko penyakit kronis di masa depan.

Pemerintah Kota Subulussalam merasa perlu untuk mengambil tindakan konkret dalam penanggulangan stunting di wilayahnya. Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 16.a Tahun 2019 tentang Penanggulangan Stunting, menjadi dasar dalam pelaksanaan program penanggulangan stunting di Dinas Kesehatan Kota Subulussalam. Namun, perlu dikaji sejauh mana peraturan ini diimplementasikan dengan baik dan berhasil mencapai tujuan yang diharapkan. Program penanggulangan stunting bukan hanya tentang langkah-langkah awal, tetapi juga tentang bagaimana program tersebut dapat berkelanjutan dalam jangka panjang dan memperoleh dukungan yang berkelanjutan dari berbagai pemangku kepentingan.

Dalam mengetahui implementasi kebijakan penanggulangan stunting di

Dinas Kesehatan Kota Subulussalam. Perlunya untuk mengetahui faktor-faktor penghambat seperti, faktor-faktor kelembagaan, sumber daya manusia, anggaran, koordinasi antar instansi, dan partisipasi masyarakat. serta mengidentifikasi keberhasilan, kelemahan, dan peluang perbaikan dari peraturan dan program yang ada, sehingga dapat dilakukan langkah-langkah perbaikan dan pengembangan kebijakan yang lebih efektif.

Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 16.a Tahun 2019 menyediakan kerangka kerja yang jelas dan terstruktur untuk melaksanakan program penanggulangan stunting. Rencana dan pendekatan terpadu diperlukan untuk memastikan bahwa berbagai kegiatan dan program yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Subulussalam dan pihak terkait lainnya saling mendukung dan berjalan sejalan. Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 16.a Tahun 2019 juga didasarkan pada undang-undang dan peraturan yang lebih luas yang mengatur tentang kesehatan masyarakat dan perlindungan anak. Dengan adanya peraturan ini, implementasi program penanggulangan stunting diharapkan dapat lebih terjamin dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

METODE

penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif meliputi pengumpulan data atau menjawab pertanyaan mengenai setatus terakhir dari subyek penelitian. Misal: penilaian sikap atau pendapat terhadap individu, organisasi, keadaan, ataupun prosedur. Penelitian deskriptif ini hanya

menggambarkan obyek penelitian, menggunakan analisis kualitatif dan tanpa pengujian hipotesis (Siti Aisyah Tri Rahayu: 2019).

Berdasarkan teori tersebut penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui gambaran masalah yang diteliti, yang lebih memperhatikan karakteristik, kualitas, dan keterkaitan antar kegiatan. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, penelitian akan dilakukan dengan mencari data-data dan fakta-fakta di Dinas Kesehatan Kota Subulussalam agar mengetahui implementasi penanggulangan stunting yang terjadi di Kota Subulussalam khususnya, dengan mengacu pada Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 16.a Tahun 2019.

Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Kesehatan Kota Subulussalam yang beralamat di Komplek Perkantoran A PEMKO Subulussalam, Kampong, Lae Oram, Kec. Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Aceh.

Informan pada penelitian ini dipilih dengan teknik *purposive sampling* yaitu sebagai berikut:

1. Informan Kunci adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Subulussalam karena beliau adalah sumber informasi secara umum dan orang yang memahami secara konseptual setiap yang ada di Dinas Kesehatan Kota Subulussalam;

2. Informan Utama adalah Bidang Kesehatan keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Kota Subulussalam dan Bidang Kesehatan Masyarakat, karna mereka sebagai pelaksana dan memiliki informasi dalam penagulangan stunting yang ada Kota Subulussalam

3. Informan Pendukung adalah Kader Kota Subulussalam karna memiliki informasi terkait penngulangan stunting di lapisan bawah pelaksana dari Dinas Kesehatan Kota Subulussalam dalam penangulangan stunting dan Masyarakat Kota Subulussalam karena yang merasakan dampak langsung dari kegiatan penangulangan stunting yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Subulussalam.

Miles and Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini telah memaparkan data tentang implementasi penanggulangan stunting yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Subulussalam yang dimana dalam penelitian ini menggunakan teori implementasi George Edward III (1980). Pembahasan temuan penelitian ini akan dihubungkan dengan Peraturan Wali Kota Subulussalam Nomor 16.a Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bawah Lima Tahun dan Sangat Pendek (Stunting).

1. Komunikasi

Segala sesuatu yang berhubungan untuk kelancaran suatu interaksi antara manusia ataupun organisasi ke organisasi lain memerlukan yang namanya komunikasi. Apabila suatu implementasi yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari sebuah kebijakan publik haruslah memiliki unsur komunikasi yang baik dan mengandung unsur transmisi

(penyebaran/penyaluran), kejelasan, dan konsistensi agar maksud dan tujuan tercapai.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terkait aspek komunikasi dalam implementasi penanggulangan pencegahan stunting di Kota Subulussalam yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Subulussalam. Peneliti menemukan bahwa komunikasi terkait pencegahan stunting yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Subulussalam sebagai perwakilan Pemerintah Kota Subulussalam dalam bidang kesehatan untuk pencegahan stunting dalam melaksanakan tugas intervensi gizi spesifik yang ada di Peraturan Wali Kota Subulussalam Nomor 16.a Tahun 2019 belum maksimal terlaksana dengan baik dilapangan.

2. Sumber-Sumber

Segala bentuk dukungan yang dapat mempengaruhi tingkat implementasi kebijakan publik disebut sumber-sumber. Sumber-sumber ini dapat berupa sumber daya manusia dan sumber daya non manusia, yang dimana berfungsi ketika menjalankan kebijakan publik sebagai daya dukung yang mempengaruhi untuk mencapai tujuan kebijakan publik tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terkait aspek sumber-sumber dalam implementasi penanggulangan pencegahan stunting di Kota Subulussalam yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Subulussalam. Peneliti menemukan bahwa fasilitas terkait pencegahan stunting yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Subulussalam memang ada, akan tetapi fasilitas makan tambahan ataupun vitamin-vitamin yang diberikan kepada masyarakat baru

berjalan pada bulan Mei tahun 2023, semenjak peraturan diterbitkan Peraturan pencegahan stunting pada tahun 2019 lalu. Hal ini menjadi salah satu faktor prevalensi balita yang terkena stunting di Kota Subulussalam tetap tinggi dalam survei Nasional yang dilakukan sampai data yang terakhir 2022 lalu. Keterlambatan penyediaan untuk makanan tambahan dan sejenisnya yang diperuntukkan pencegahan stunting membuktikan aspek sumber-sumber pencegahan stunting yang dilakukan pihak Dinas Kesehatan Kota Subulussalam lambat.

Terkait fasilitas Rumah Gizi Kampung yang dibangun untuk diharapkan menjadi wadah bagi masyarakat juga tidak berjalan secara baik, pelayanan saat ini tidak berjalan lagi semestinya. Kejadiannya mencerminkan kurangnya perhatian dan ketegasan dari Dinas Kesehatan Kota Subulussalam dalam penanggulangan pencegahan stunting di Kota Subulussalam. Agar prevalensi balita stunting di Kota Subulussalam Dinas Kesehatan Kota Subulussalam harus menyediakan, memanfaatkan dan menjalankan terkait sumber-sumber yang mendukung pencegahan stunting secara lebih baik lagi, sampai angka balita stunting di Kota Subulussalam dalam survei yang dilakukan dibawah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menurun sesuai standar yang ingin dicapai Pemerintah Indonesia yaitu 14% prevalensi balita stunting di Indonesia.

3. Sikap Pelaksana

Pengaruh yang sering menghambat implementasi suatu kebijakan publik yaitu sikap pelaksana. Sikap pelaksana ini juga memiliki keterkaitan dengan gaya

kepemimpinan dalam implementasi kebijakan publik. Apabila para pelaksana memiliki rasa tanggung jawab dan memahami tujuan dari sebuah kebijakan publik akan otomatis tingkat keberhasilan dalam implementasi kebijakan publik tersebut tinggi.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terkait aspek sikap pelaksana dalam implementasi penanggulangan pencegahan stunting di Kota Subulussalam yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Subulussalam. Peneliti menemukan bahwa para pelaksana pencegahan stunting dari Dinas Kesehatan Kota Subulussalam menjadi bingung melihat respon masyarakat yang terkesan tidak takut terhadap dampak dari stunting karena masyarakat yang diberikan penyuluhan ataupun edukasi merasa dengan gaya hidup yang kurang bersih tidak menimbulkan penyakit kepada mereka dari dulu-dulu dan juga pola makanan yang kurang sehat atau minim gizi tidak menjadi masalah bagi mereka dengan menyatakan bahwa keluarga juga memiliki orang-orang yang berpendidikan dengan makan ala kadarnya dan hidup dalam lingkungan yang kurang bersih di mata dunia kesehatan.

4. Struktur Birokrasi

Menciptakan ketepatan dalam implementasi kebijakan publik suatu keharusan. Agar implementasi yang dilakukan tersistematis dan efektif untuk mewujudkan tujuan kebijakan publik tersebut. Dengan pembuatan standar operating procedures (sops)/program kerja dan fragmentasi atau pembagian tanggung jawab dalam melaksanakan implementasinya.

Berdasarkan pembahasan di atas menunjukkan teori implementasi George Edward III (1980) yang digunakan peneliti untuk membantu dalam penelitian ini, terhadap implementasi Peraturan Wali Kota Subulussalam Nomor 16.a Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bawah Lima Tahun dan Sangat Pendek (Stunting).

Hasil penelitian telah menunjukkan bahwa terpenuhi unsur-unsur teori implementasi berdasarkan wawancara dengan pihak Dinas Kesehatan Kota Subulussalam. Akan tetapi realita di lapangan banyak yang menjadi faktor-faktor prevalensi balita stunting tetap tinggi hingga saat ini di Kota Subulussalam hal ini disebabkan kurangnya keseriusan dan efektifitas pencegahan stunting baik dari Pemerintah Kota Subulussalam dan Dinas Kesehatan Kota Subulussalam serta faktor penghambat dari pihak masyarakat yang kurang partisipasi dalam pencegahan stunting di Kota Subulussalam.

KESIMPULAN

- 1) Komunikasi dalam meedukasikan dan mensosialisasikan kepada masyarakat masih kurang maksimal sehingga banyak masyarakat di Kota Subulussalam belum memahami tentang stunting dan pencegahan stunting
- 2) Sumber-sumber untuk menimplementasikan kebijakan sudah memiliki sumber-sumber untuk mendukung implementasi kebijakan, namun belum dijalankan secara maksimal di lapangan

- 3) Sikap pelaksana untuk mengimplementasikan kebijakan sudah baik yang dimana sikap semangat dan tidak acuh dalam menjalankan tugas
- 4) Struktur Birokrasi pada Dinas Kesehatan kota Subulussalam berdasarkan hasil lapangan maka penulis dapat mendeskripsikan bahwa SOP dalam pelaksana kebijakan sudah cukup baik.

DAFTAR BACAAN

- Agustiono, Impelementasi Kebijakan publik Model Van Meter dan Van Horn, (Jakarta : Rajawali Press, 2010).
- Ahmad Ali, dkk, Menjelajah Kajian Empiris Terhadap Hukum, Kencana Prenada Media. Group, Jakarta, 2012.
- Alfabeta, 2013J.R. Raco. "Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya". (Jakarta. PT.Grasindo. 2010).
- Edward III, Georgi C, public Policy Impelementing, London : jai Press Inc, 1990).
- Haedar Akib. Jurnal Administrasi Publik: Volume 1 (Nomor 1) tahun 2010.
- Hariyanto, Belajardan Pembelajaran sebuah Teori dan Konsep Dasar, Bandung:Remaja Rosdakarya, 2000.
- Husaini Usman, Manajemen, Teori, Praktik dan Riset Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006).
- Jeremias T Kaban. Enam Dimensi Strategi administrasi Publik : Konsep, Teori Dan Isu. Alfatih Op, Cit.
- J.R. Raco."Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya". (Jakarta. PT.Grasindo. 2010).
- Mustopadidjaja, Manajemen Proses Kebijakan Publik. Impelementasi Dan Evaluasi Kinerja. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta 2002.
- Nanang Fattah Landasan Manajemen Pendidikan, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2008).
- Nuryanti Mustari."Pemahaman Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan Publik" (Yogyakarta. LeutikaPrio. 2015).
- Paskalia dan Sunarti Kegiatan Pembiayaan dan jaminan Kesehatan Tahun 2020- 2024.
- Shaya Anggara."Kebijakan Publik" (Bandung. CV. Pustaka Setia. 2014).
- Siti Aisyah Tri Rahayu. "Metode Penulisan Ilmiah" (Surakarta: CV. Djiwa Amarta Press. 2019).
- Solichin Abdul Wahab. Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebikan Negara. Bumi Aksara . Jakarta : 2024.
- Soetjahningsih, IG,N, Gde Ranuh. Tumbuh Kembang Anak. Ed : 2 Jakarta : PENERBIT BUKU KEDOKTERAN EGC : 2012.
- Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D" (Bandung: Alfabeta, 2013).

Suparlan Al Hakim, Pendidikan
Kewarganegaraan Untuk
Perguruan Tinggi.

Universitas Negeri Malang. Malang. 2002.

Supariasa, dkk. "Penilaian Status Gizi". (Jakarta : Penerbitan Buku Kedokteran EGC,2020.

Syaiful Sagala., Manajemen Strategi dalam Peningkatan Mutu Pendidikan, (Bandung Alfabeta, 2009).

Tabrani Rusyan, Pendekatan dalam Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Remaja Rosdakarya)

Warta Kesmas, 2018. Dinkes, file:///G:/Warta -kesmes -Edisi-02-2018-1136%20 stunting .pdf

Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 16.A Tahun 2019 Tentang Penangulangan Stunting